

Multy Policies Strategy Uuntuk Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sekalipun bangsa ini telah merdeka lebih dari setengah abad, tetapi ternyata masih menyisakan persoalan pendidikan yang cukup rumit untuk dipecahkan. Problem pendidikan sepertinya tidak pernah berkurang dari waktu ke waktu, dan anehnya jenis persoalannya tidak pernah berganti dan berubah, yakni masih di seputar hal-hal berikut ini. (1). Jangkauan pendidikan yang belum merata, (2) Kualitas hasil pendidikan yang belum memuaskan, (3). Dana yang tersedia terbatas, (4) Belum ada relevansi antara hasil pendidikan dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan di masyarakat, (5). Kesejahteraan guru yang masih rendah, (6) Sarana dan prasarana pendidikan belum tercukupi, dan (7). Manajemen penyelenggaraan pendidikan, apakah seharusnya ditangani oleh satu departemen ataukah masih dimungkinkan berbagai departemen ambil bagian menanganinya.

Persoalan tersebut dari waktu ke waktu selalu menjadi perbincangan hangat yang tidak pernah henti. Kebijakan demi kebijakan diambil untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, hasilnya tidak pernah terasa secara signifikan. Undang-undang Pendidikan Nasional telah berhasil dibuat, dan begitu pula peraturan-peraturan lain sebagai pedoman pelaksanaannya. Persoalan pendidikan rasanya semakin lama tidak semakin mengecil, melainkan justru sebaliknya, semakin kompleks. Program Wajar 9 tahun misalnya, walaupun sudah sekian lama dicanangkan, angka tentang jumlah anak putus sekolah dan bahkan data tentang anak yang belum mengenyam pendidikan, masih saja semakin besar. Persoalan pendidikan kemudian tidak saja menyangkut besarnya dana yang harus disediakan, melainkan juga menyangkut ekonomi masyarakat, kultur dan atau budaya.

Persoalan pendidikan yang lebih serius, terlihat di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Kelompok mereka itu, sebatas mendapatkan pendidikan dasar saja, belum tercukupi. Jika kita berbicara tentang kelompok masyarakat yang belum mengenyam pendidikan dan angka drop out yang tinggi, maka yang terbanyak adalah di kelompok masyarakat tertentu. Yaitu di kalangan orang-orang yang belum teruntungkan dari sisi ekonomi dan juga pada umumnya mereka yang bertempat di daerah-daerah terpencil, di pulau-pulau kecil, pedalaman dan sejenisnya. Sebaliknya, masyarakat ekonomi kuat, pada umumnya sudah sadar betapa pentingnya pendidikan dan bahkan lebih dari itu, mereka telah memilih jenis pendidikan yang berkualitas. Kelompok terakhir ini, karena memiliki fasilitas lebih, dalam hal memenuhi kebutuhan pendidikan, tidak segan mengeluarkan biaya tinggi dan bahkan mengirimkan putra-putrinya ke luar negeri dengan alasan mengejar kualitas.

Selama ini publik masih merasakan bahwa dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk membiayai pendidikan masih belum sebanding dengan anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi pendidikan yang berkualitas. Keadaan itu lebih lanjut rupanya menjadi lebih parah, karena belum terakomodasi adanya jenis kebijakan terhadap realitas sosial masyarakat yang memiliki strata sosial yang berbeda. Jumlah dana yang terbatas, kadangkala belum menyentuh secara strategis untuk semakin mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Belum lagi, dana pendidikan yang terbatas juga masih belum memperhatikan prioritas secara strategis. Misalnya, apakah biaya pendidikan yang terbatas itu sudah teralokasikan pada wilayah-wilayah yang lebih tepat dan atau strategis. Selain itu semestinya, untuk meraih kualitas pendidikan, semestinya dana yang terbatas itu diarahkan untuk membiayai pelaku utama pendidikan dan bukan pada wilayah manajerialnya.

Peran Pendidikan dalam Membangun Bangsa

Tanpa dilakukan pengamatan secara lebih mendalam, tampak bahwa memang tingkat ekonomi masyarakat sebanding lurus dengan tingkat pendidikannya. Orang-orang berekonomi lemah, sesungguhnya adalah mereka yang tidak mendapatkan pendidikan secara cukup. Mereka yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan pada umumnya adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang mencukupi. Karena itu, siapa saja yang memimpin negeri ini jika berkeinginan mengentaskan mereka dari kemiskinan, maka pintu strategis yang harus dipilih adalah memberikan mereka pendidikan yang mencukupi.

Jika pendidikan dijadikan pilihan pengentasan kemiskinan, lalu dari mana langkah itu seharusnya dimulai. Terdapat “kata-kata hikmah” yang sangat populer untuk dijadikan pegangan dalam mengurus bangsa yang rasanya sangat masuk akal. Kata-kata hikmah itu mengatakan bahwa : “Jika kamu ingin membangun bangsamu maka bangunlah pendidikanmu. Dan jika kamu ingin membangun pendidikanmu, agar berhasil maka muliakanlah guru-gurumu”. Bangsa ini dalam hal membangun pendidikan, rupanya belum memulai dari upaya memuliakan guru. Guru belum berhasil menjadi kelompok manusia yang bermartabat, dan bahkan masih sebaliknya. Sebagai ilustrasi, jika ada rumah sederhana dan bahkan masih berstatus sewa, biasanya penghuninya adalah guru, Jika ada mobil atau sepeda motor yang sudah tua, yang seringkali mogok, maka pantas jika si empunya adalah guru. Selebihnya, jika ada koperasi yang peminjamnya jauh lebih banyak dari penabungnya, maka koperasi itu biasanya adalah milik para guru. Mungkin ada di antara kita yang menganggap bahwa ilustrasi ini terlalu berlebih-lebihan, tetapi itulah sesungguhnya kehidupan guru. Bahkan kalau tulisan ini menyebut istilah guru, maka sesungguhnya adalah termasuk guru di perguruan tinggi, yang disebut sebagai dosen dan bahkan juga guru besarnya. Bandingkan, gaji Guru Besar (profesor) hanya sekitar 3 juta, sedangkan gaji anggota parlemen (DPR) tidak kurang dari 40 juta setiap bulan. Tentu lebih memprihatinkan lagi gaji guru Sekolah Dasar; dan bahkan lebih sengsara dari itu adalah guru yang berstatus honorer. Status sosial guru seperti ini menjadikan orang tidak terlalu berminat pada jenis pekerjaan ini, kecuali mereka yang benar-benar memiliki panggilan jiwa sebagai pendidik. Orang yang memiliki alternatif lapangan kerja lebih banyak, apalagi yang memiliki kecerdasan dan ijazah cukup, biasanya memilih jenis profesi selain guru. Atau, tidak sedikit orang, sekalipun masih berprofesi sebagai guru, akhirnya kabur ke negeri orang menjadi guru di sana. Siapa yang merugi dari keputusan ini, tentu adalah bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dan siapapun, tidak akan bisa menyalahkan mereka dengan berbagai dalih, sebab mereka yang kabur ke negeri orang, juga memiliki hak untuk menyejahterakan diri dan keluarganya, sekalipun pilihan itu mungkin dirasa pahit.

Berangkat dari fenomena di muka, maka membangun pendidikan harus dimulai dari memuliakan guru. Akhir-akhir ini sudah tampak ada upaya memperhatikan nasib guru, dengan kebijakan, bahwa akan menjadikan guru sebagai tenaga profesi. Guru akan diberi sertifikat sebagai dasar pemberian tunjangan profesinya. Kebijakan itu sedang berjalan, dan tentu penyelesaian untuk memberikan status dengan melalui portofolio dan tambahan pendidikan memerlukan waktu yang lama dan dana yang tidak sedikit. Tetapi inilah cara berpikir pemimpin bangsa ini, lebih suka menempuh jarak panjang tatkala akan menyejahterakan orang yang berjasa, sekalipun dengan cara itu, bisa jadi berkonsekuensi tidak akan sampai pada target yang dituju, karena jalan yang dipilih terlalu panjang. Rupanya bangsa ini memang suka berpikir dan menempuh jalan liku dan panjang, termasuk tatkala menyejahterakan guru/dosen. Para guru seharusnya sudah lama mendapatkan imbalan kesejahteraan yang memadai, namun masih

harus menunggu waktu dan proses yang berliku-liku lewat program sertifikasi segala. Bahwa para guru/dosen yang sudah lama mendedikasikan diri melalui mengajar/mendidik, sesungguhnya sudah secara otomatis menambah pengetahuan dan ketrampilannya secara mandiri, tidak pernah diperhitungkan. Dalam menyejahterakan orang yang berjasa, yakni para guru ini seolah-olah ada rumus, belum ikhlas jika tanpa melalui proses panjang dan mahal. Inilah nasib guru bangsa ini, yang sesungguhnya atas jasa mereka, para murid-muridnya berhasil menduduki posisi-posisi penting, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun pengusaha sukses di berbagai bidang. Semoga pengambil keputusan dalam menyejahterakan guru tidak termasuk orang-orang yang melupakan jasa mulia orang tua dan para orang yang telah berjasa mendidik dan memintarkan dirinya, yakni para guru ini. Jika kita meyakini bahwa kunci kekuatan bangsa adalah terletak pada tingkat kualitas SDM warga negaranya, maka mau tidak mau, yang harus dipikirkan adalah bagaimana membangun pendidikannya. Sebab untuk membangun sebuah bangsa yang berkualitas, sehingga berhasil duduk sejajar dengan bangsa lain, dan lebih-lebih jika bercita-cita selalu bisa memenangkan dalam semua persaingan yang terjadi, maka kuncinya adalah melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikannya secara signifikan. Sebab sarana peningkatan kualitas pendidikan tidak ada lain kecuali pendidikan, pada semua jenjang dan jenisnya. Jika kita masih lena dan apalagi lambat dalam mengurus pendidikan, maka bangsa ini akan semakin jauh tertinggal dari bangsa lain.

Dua Jenis Realitas Bangsa Indonesia

Secara garis besar, bangsa ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok yang telah berhasil membangun ekonominya, sehingga bisa disebut sebagai berekonomi kuat dan kedua, kelompok yang masih belum berhasil membangun sosial ekonominya. Data yang cukup tentang gambaran ini belum saya miliki, tetapi dari hasil pengamatan dan mengikuti data statistik yang ada, ternyata dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah mereka yang masuk kategori ekonomi kuat, jauh lebih kecil bilamana dibandingkan dengan mereka yang masih tergolong berada pada taraf ekonomi lemah.

Kedua kelompok ini nyata adanya di tengah masyarakat bangsa kita. Kalau kita berbicara tentang kesenjangan di tengah masyarakat, maka sesungguhnya justru sumbernya itu adalah berawal dari fenomena ketidak merataan di bidang pendidikan ini. Selama keadaan yang paradok ini dibiarkan dalam arti tidak ada upaya-upaya kongkrit untuk mendekatkan di antara keduanya, maka kesenjangan ekonomi yang dirasakan sebagai sesuatu yang membahayakan kehidupan bangsa, maka akan tetap berjalan. Sebab kedua kelompok ini, memiliki logika, produk sosial dan konsekuensi yang jauh terkait dengan persoalan ekonomi, politik dan bahkan sosial lain yang lebih luas.

Kelompok masyarakat yang pertama, yaitu yang berekonomi lemah, maka biasanya lembaga pendidikannya juga berkualitas rendah. Lembaga pendidikan yang berkualitas rendah juga akan memproduksi SDM berkualitas rendah pula. Mereka itu tentu saja tidak akan mampu berkompetisi di tengah persaingan yang keras dan juga tidak akan mampu memasuki sektor ekonomi modern. Sebagai akibatnya mereka akan terpinggirkan dan kalau pun toh bisa memasuki lapangan kerja, adalah di kelas bawah yang berpendapatan rendah. Mereka akan bekerja di sektor-sektor informal, sebagai buruh, pedagang kaki lima, buruh tani, nelayan tradisional dan sejenisnya.

Keadaan ini menggambarkan sebuah siklus, yang bergerak dari satu titik lemah menuju titik lemah berikutnya yang serba tidak menguntungkan. Keadaan sulit seperti ini tampaknya tidak mungkin ditinggalkan oleh mereka yang tenggelam di dalamnya, yaitu masyarakat miskin yang bersangkutan.

Mereka tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari lingkaran setan ini, kecuali orang-orang tertentu yang berani mengadu nasib. Para tenaga kerja yang mengadu nasib dengan bekal ilmu dan ketrampilan seadanya, sesungguhnya adalah orang-orang yang berusaha keluar dari lingkaran setan yang menyesak ini. Terhadap kelompok masyarakat seperti ini, semestinya pemerintah memberikan advokasi secara penuh, yakni memberikan fasilitas pendidikan sepenuhnya secara cukup atau memadai.

Jika kita berbicara tentang persoalan Program Wajar 9 tahun yang belum berhasil secara maksimal, sesungguhnya adalah membicarakan jenis kelompok masyarakat. Jika masih saja ada anggota masyarakat yang belum berhasil mengenyam pendidikan dan juga drop out, maka mereka itu adalah berasal dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung di bidang ekonomi ini. Karena itu berbicara tentang persoalan wajar 9 tahun sama halnya dengan berbicara tentang pendidikan masyarakat miskin dengan berbagai problemnya.

Di kalangan masyarakat ekonomi lemah ini, ternyata tidak sedikit terdapat lembaga pendidikan tingkat dasar yang dikelola oleh masyarakat, dengan status swasta. Sebagaimana status mereka ini, segala kebutuhan pendidikan mulai dari penyediaan fasilitas pendidikan –bangunan gedung, buku bacaan, alat-alat lainnya, termasuk tenaga gurunya diurus dan dibiayai oleh lembaga-lembaga swasta, yang sesungguhnya kekuatan yang disandangnya kebanyakan sangat terbatas. Lembaga pendidikan Madrasah Swasta –MI, M.Ts., dan MA– sebagian besar masuk dalam kategori kelompok ini, dan jumlahnya cukup besar, yakni tidak kurang dari 18 % dari jumlah lembaga pendidikan yang ada. Lembaga pendidikan ini berada di bawah pembinaan Departemen Agama, yang menurut informasi lebih dari 90 % berstatus swasta itu. Mereka itu sebagian besar keadaannya tepat disebut memprihatinkan itu.

Sedangkan realitas bangsa yang kedua, adalah mereka yang sudah berhasil membangun tingkat ekonomi sehingga pantas disebut sebagai kelompok yang tergolong ekonomi kuat. Mereka ini telah berhasil memenangkan persaingan, mampu memilih pendidikan dan bahkan membangun pendidikan yang berkualitas. Kelompok inilah yang berhasil membangun SDM yang berkualitas tinggi dan dampaknya mampu berkompetisi dan berpeluang memasuki sektor ekonomi modern. Pendapatan mereka juga akan tinggi dan karena itulah mereka akan tepat disebut sebagai telah mampu membangun ekonomi kuat. Sayangnya jumlah mereka di tanah air ini, belum terlalu besar. Terhadap kelompok ini, sesungguhnya pemerintah tidak terlalu perlu untuk memberikan advokasi, melainkan justru yang lebih tepat adalah memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam membangun dan membiayai pendidikannya sendiri.

Tawaran Solusi

Untuk memecahkan problem pendidikan di tanah air ini, terutama jika sebatas yang terkait dengan keterbatasan dana yang tersedia, misalnya termasuk untuk mensukseskan wajar 9 tahun, maka perlu diambil strategi multi kebijakan (multy policies strategy) dalam bidang pendidikan. Realitas masyarakat Indonesia beragam, maka tidak tepat diberlakukan kebijakan secara seragam apalagi sama. Masyarakat lemah dari sisi ekonomi harus diberikan advokasi secara penuh. Sebaliknya bagi mereka yang tergolong ekonomi kuat, sudah waktunya diberikan peluang seluas-luasnya berpartisipasi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.

Selain itu, harus ada kesamaan cara melihat bangsa yang bersifat beragam atau plural ini sebagai

kenyataan apa adanya. Kebijakan harus diarahkan bagaimana agar bangsa ini maju secara keseluruhan. Adanya kenyataan di tengah-tengah masyarakat, bahwa selain ada sekolah umum seperti SD, SMP dan SMU juga masih ada lembaga yang bernuansa keagamaan seperti MI, M.Ts dan MA tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang harus terlalu dibedakan termasuk dalam pembinaannya. Jika jenis madrasah yang selama ini kebanyakan berstatus swasta (lebih 90%), maka harus dicarikan jalan keluar pengembangannya agar tidak selalu terabaikan. Sebab, secara kuantitas cukup besar (18%) dari jumlah lembaga pendidikan yang ada, sehingga jika mereka ini tertinggal sebagai akibat kurang memperoleh perhatian, akan berkonsekuensi pada lahirnya kelompok tertinggal baru, yang tidak akan menguntungkan bagi bangsa ini secara keseluruhan.

Untuk mengarah pada kebijakan ini, sudah barang tentu diperlukan upaya untuk melakukan pemetaan masyarakat sekaligus melakukan positioning lembaga pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah atau ekonomi kuat. Kebijakan yang bersifat ragam, tidak harus dimaknai sebagai pengambilan keputusan yang tidak adil, melainkan sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan sekaligus pemerataannya.